



EDISI DESEMBER 2020

WARTA KOMINFO

DINAS KOMINFO NATUNA

11

PEMKAB NATUNA USULKAN
SEJUMLAH PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR KE
PEMERINTAH PUSAT

13

PENCANANGAN
GERAKAN INDONESIA
MEMBACA
KABUPATEN NATUNA

18

VIDCON PENYERAHAN
LPH BPK PERWAKILAN
KEPRI TERKAIT SPBE
KABUPATEN NATUNA

DAFTAR ISI

1 - 2

DAFTAR ISI

3

SALAM REDAKSI

4

SUSUNAN REDAKSI

5

JANGAN BERI STIGMA NEGATIF KEPADA PASIEN
COVID-19

6-7

WABUP NATUNA HADIRI PENYERAHAN DIPA, ALOKASI
TRANSFER DAERAH DAN DANA DESA TKDD

8

BUPATI HAMID RIZAL HADIRI RAPAT PARIPURNA
PANDANGAN AKHIR FRAKSI DPRD NATUNA

9

BUPATI HAMID RIZAL HADIRI RAPAT PARIPURNA
PANDANGAN AKHIR FRAKSI DPRD NATUNA

10

BUPATI NATUNA LANTIK BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA SE-NATUNA

11

PEMKAB NATUNA USULKAN SEJUMLAH
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KE PEMERINTAH
PUSAT

DAFTAR ISI

12

PEMKAB NATUNA GELAR RAKOR BERSAMA BPJS
KETENAGAKERJAAN KABUPATEN NATUNA

13

PENCANANGAN GERAKAN INDONESIA MEMBACA
KABUPATEN NATUNA

14

ASISTEN 1 SETDA NATUNA PIMPIN RAPAT RENCANA
KERJASAMA PT. GARUDA INDONESIA

15

BUPATI NATUNA HADIRI PENCANANGAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

16

KEMBANGKAN PARIWISATA NATUNA,
UNRI TEKEN MOU BERSAMA NDR

17

TIGA TAHUN KOPI PAGI, INSPIRASI TIADA HENTI

18

VIDCON PENYERAHAN LPH BPK PERWAKILAN KEPRI
TERKAIT SPBE KABUPATEN NATUNA

19

NATUNA GELAR DEKLARASI KOMITMEN BERSAMA
DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK



Salam Redaksi

Warta Kominfo

Selamat bersua para pembaca Buletin Warta Kominfo Edisi Desember 2020. Kami segenap redaksi Warta Kominfo mengucapkan puji syukur kepada Tuhan YME atas izinnya pada penerbitan di bulan Desember tahun 2020 ini.

Meskipun banyak referensi bacaan di Kabupaten Natuna tapi kami optimis akan mendapat tempat di hati pembaca dan menjadi acuan pembaca dalam mencari informasi aktual dan faktual di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Natuna.

Edisi kali ini kami mengekspos beberapa kegiatan Bupati, Wakil Bupati, juga kegiatan OPD termasuk kegiatan Diskominfo Natuna yang kami kemas dalam bentuk berita dan artikel Semoga sajian kami bisa bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Natuna.



SUSUNAN REDAKSI

PELINDUNG

Kadis Kominfo

PENASEHAT

Sedis Kominfo

PEMIMPIN REDAKSI

Kabid Pengelolaan Informasi
Komunikasi Publik

STAF REDAKSI

Fera Fernanda

Arman Salim

Wan Irfan

Tresna Mutiara

PENYUSUN

Fera Fernanda

DESIGN GRAFIS

Tresna Mutiara

IT SUPPORT

Arman Salim

FOTOGRAFER

Raja Riska Danty

Alamat Redaksi : Komplek Perkantoran
Pemerintahan Kabupaten Natuna Gedung B
Pulau Senua Lantai 2, Jl. Batu Sisir- Bukit Arai
Ranai-Natuna

Email : diskominfo@natunakab.go.id

JANGAN BERI STIGMA NEGATIF KEPADA PASIEN COVID-19



(wartaKominfo) – Diskriminasi, dan stigma negatif terhadap pasien covid-19 berdampak negatif terhadap kondisi pasien covid-19 sehingga dapat menurunkan imunitas tubuh pasien yang seharusnya menang melawan virus tersebut.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala UPTD Puskesmas Ranai, M. Nazari. Menurutnya masyarakat harus mampu membangun empati terhadap sesama yang terdampak covid-19 dan berupaya membangun hal-hal positif untuk mencegah stigma dan diskriminasi tersebut.

“Sebenarnya stigma negatif muncul karena adanya kecemasan berlebih dari masyarakat karena virus tersebut. Posisikan diri kita menjadi pasien tersebut, bangunlah rasa empati” ujar Nazari kepada pewartaKominfo. Selasa, (01/12)

Selain ia juga menyampaikan agar masyarakat tidak mudah meneruskan informasi hoak karena hal tersebut dapat menyebabkan kekhawatiran.

Diketahui bahwa dalam satu bulan terakhir terjadi peningkatan kasus covid-19 di Kabupaten Natuna dengan rata rata gejala ringan bahkan OTG. Tercatat bahwa sampai dengan 30/11, ada 55 kasus di Natuna. Dengan rincian, 1 kasus meninggal, 32 kasus sembuh dan 22 kasus yang masih diisolasi. Dari sejumlah kasus tersebut, kebanyakan adalah orang tanpa gejala (OTG).

“Kasus di Natuna hampir semua tanpa gejala atau gejala ringan. Tidak dengan gejala berat seperti yang terjadi pada awal mula pandemi” ucap nya.

Ia juga menuturkan bahwa jika pasien dengan gejala ringan atau OTG, tidak perlu dilakukan test atau swab lagi, melainkan cukup dengan isolasi selama 14 hari saja.

Kepada masyarakat Natuna ia berpesan agar tetap menjaga protokol kesehatan, imunitas tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan olahraga. Karena siapapun dapat terpapar. Bahkan, pasien yang sudah sembuh pun berpotensi terpapar kembali jika tidak menjaga protokol kesehatan. (Diskominfo/Fera)

WABUP NATUNA HADIRI PENYERAHAN DIPA, ALOKASI TRANSFER DAERAH DAN DANA DESA TKDD



Wakil Bupati (Wabup) Natuna, Hj. Ngesti Yuni Suprapti, MA., menghadiri secara langsung acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Daftar Alokasi Transfer ke Daerah serta Dana Desa TKDD untuk Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), tahun anggaran 2021.

Acara yang dihadiri langsung oleh Pjs. Gubernur Kepri, Bahtiar Baharuddin, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kepri, Teguh Dwi Nugroho, Sekda Kepri Arif Fadillah, Kajati Kepri Sudarwidadi, Wakil Ketua I DPRD Kepri, Dewi Kumalasari, Danlantamal IV Tanjungpinang Laksmas TNI Indarto Budiarto, Danrem 033/WP Brigjen TNI Harnoto, Danlanud Tanjungpinang Kolonel Pnb Andi Wijanarko, Bupati/ Walikota se-Propinsi Kepri, perwakilan lembaga vertikal serta para OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri itu, berlangsung di Kantor Gubernur Kepri, Aula Wan Sri Beni, Dompok, Kota Tanjungpinang, pada Selasa (01/12) siang.

Dalam sambutannya Bahtiar Baharuddin mengatakan, bahwa alokasi dana yang telah diterima oleh masing-masing instansi, hendaknya benar-benar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat, menjadi alat untuk mensejahterakan masyarakat Kepri, dan juga dapat menjadi alat dalam pemulihan ekonomi di Kepri.

Pjs Gubernur berharap agar dengan adanya alokasi anggaran sebesar Rp 14.787 triliun dari APBN tahun anggaran 2021 tersebut, kedepan dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi Kepri. Sehingga pertumbuhan negatif di 2020 secara perlahan dapat dikembalikan menjadi positif atau reborn.

Sesuai tema penyerahan DIPA tahun 2021 ini, yaitu "Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi", maka Bahtiar berharap agar APBN tahun anggaran 2021 menjadi alat fiskal dalam melanjutkan upaya pemulihan sosial dan ekonomi, akibat adanya pandemi Covid-19. Selain itu diharapkan juga mampu mendorong akselerasi reformasi belanja, dalam rangka penyehatan fiskal bagi meningkatkan produktivitas, daya saing dan iklim investasi sekaligus penguatan efektivitas belanja.

Penggunaan dana APBN terkait dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, lanjut Bahtiar Baharuddin, harus berpedoman pada regulasi yang berlaku, baik terkait dengan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pelaksanaan belanja, maupun dalam pertanggungjawabannya. Dan harus menjaga integritas dalam pengelolaan anggaran serta melaksanakan anggaran secara akuntabel dan sesuai tata kelola yang berlaku.

WABUP NATUNA HADIRI PENYERAHAN DIPA, ALOKASI TRANSFER DAERAH DAN DANA DESA TKDD



Selain itu, Pjs Gubernur meminta kepada setiap jajaran Pemerintah Daerah harus dapat bekerja dengan cepat, responsif dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap segala permasalahan yang dihadapi bangsa dan Negara, serta anggaran yang telah dialokasikan tersebut dapat dipergunakan dengan baik, sehingga benar-benar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat di Kepri.

Dalam kesempatan yang sama, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri, Teguh Dwi Nugroho menjelaskan, bahwa di Provinsi Kepri diserahkan DIPA tahun 2021 sebanyak 326 DIPA di 40 Kementerian Lembaga dan 7 daftar alokasi transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepri.

Total anggaran yang di transfer ke Pemerintah Provinsi Kepri sebesar Rp 14.787 triliun, atau sekitar 0,54 persen dari APBN tahun anggaran 2021 yang berjumlah Rp 2.750 triliun.

Teguh Dwi Nugroho meminta agar setiap penerima DIPA dapat mengelola anggaran secara strategis dan harus dilakukan dengan beberapa tahapan, pertama harus meneliti DIPA yang diterima, kedua menyusun time frame of budget, ketiga melakukan lelang barang dan jasa sejak Desember, keempat mengajukan UP dan TUP sesuai perkiraan kebutuhan dan kelima mempersiapkan kapasitas SDM pengelola keuangan.

Seusai penyerahan DIPA kepada unsur Forkopimda, unsur Kantor Pusat Kementerian Lembaga dan Lembaga Unsur Kantor Daerah Kementerian Negara, unsur SKPD dan Pelaksana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2021, juga dilakukan penyerahan Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Provinsi Kepri tahun anggaran 2019.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Pakta Integritas secara simbolis, sebagai wujud komitmen bersama untuk melaksanakan pengelolaan anggaran sesuai dengan Peraturan dan Komitmen untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). (Pro_Kopim/Red)

BUPATI HAMID RIZAL HADIRI RAPAT PARIPURNA PANDANGAN AKHIR FRAKSI DPRD NATUNA



Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah.

Hasil pembahasan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna tahun anggaran 2021, oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Natuna dan TAPD Kabupaten Natuna bersama OPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.

Pendapatan daerah Kabupaten Natuna pada APBD tahun 2021 disepakati sebesar Rp. 975.690.187.238,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah), yang disampaikan dalam pidato Bupati Natuna tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna tahun anggaran 2021 dengan uraian sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 73.392.152.922 (Tujuh puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah). Pendapatan transfer pada APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar 890.901.455.386,00 (delapan ratus sembilan puluh miliar sembilan ratus satu juta empat ratus lima puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah). Lain-lain pendapatan yang sah APBD tahun 2021 dianggarkan 11.396.578.930,00 (sebelas miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).

Target Belanja Daerah Kabupaten Natuna pada APBD tahun anggaran 2021 disepakati sebesar Rp 1.094.642.021.000,00 (satu triliun sembilan puluh empat miliar enam ratus empat puluh dua juta dua puluh satu ribu rupiah).

Sementara untuk Pembiayaan Daerah Kabupaten Natuna pada APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp 120.951.833.762,00 (seratus dua puluh miliar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah). Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Natuna tahun anggaran 2021 yang berasal dari modal investasi Pemerintah Daerah sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Sehubungan dengan rincian Rancangan APBD Kabupaten Natuna tahun anggaran 2021, mengalami penurunan dikarenakan adanya krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang mengakibatkan melemahnya roda perekonomian dari Pemerintah Pusat sampai melemahnya ekonomi di tingkat Daerah.

Lebih lanjut beberapa fraksi menyampaikan sumbangsih pikiran saran dan pendapat, diantaranya fraksi PNR yang disampaikan oleh Junaidi, bahwa pihaknya meminta kepada Bupati Natuna untuk mengutamakan transparansi, kredibilitas dan akuntabilitas sesuai dengan amanat undang-undang serta mengharapkan kepada Pemerintah Daerah untuk memperhatikan fokus Pemerintah Pusat dalam mengelola APBN tahun anggaran 2021, yakni masalah kesehatan, sosial, ekonomi dan reformasi struktural.

Fraksi PNR juga mengharapkan kepada Pemerintah Daerah agar membuat terobosan pencapaian penanganan pandemi Covid-19, memperhatikan tunjangan dan insentif tenaga kesehatan yang sekarang berjuang dalam penanganan Covid-19, melakukan tindakan tegas kepada para pasien positif Covid-19 maupun yang reatif, menyediakan tempat yang layak dan nyaman bagi pasien serta tenaga kesehatan yang dikarantina secara terpadu, baik yang reaktif maupun yang positif.

Lebih lanjut agar dalam melakukan proses penanganan Covid-19, harus sesuai standar Nasional, seperti saat mengurus jenazah pasien Covid-19 baik dari urusan jenazah sampai perlengkapan penguburan jenazah, terutama peti jenazah yang harus sesuai standar. Karena sudah ada 2 (dua) jenazah yang dikuburkan secara protokol Covid-19 serta memperhatikan dan mencari solusi bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terdampak Covid-19. Sehingga usaha masyarakat dan ekonomi produktif tetap berjalan dan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja dan menghindari berdampak pada penurunan pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Natuna.

BUPATI HAMID RIZAL HADIRI RAPAT PARIPURNA PANDANGAN AKHIR FRAKSI DPRD NATUNA



Kemudian, juga harus memprioritaskan hak dasar masyarakat akan kebutuhan air bersih, yang selalu menjadi persoalan di musim kemarau. Fraksi PNR mengharapkan Kepada Bupati Natuna untuk dapat menyelesaikan serta memprioritaskan segala pembangunan yang masih terbengkalai. Sementara untuk alokasi anggaran DAK diharapkan agar dapat disalurkan secara merata pada masing-masing Kecamatan dan meminta kepada Bupati Natuna agar menjelaskan sampai di mana proses studi lahan embung sebayar, serta juga terkait saran pembebasan lahan agar meluruskan informasi apakah Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) di Batam akan memindahkan pembangunan embung ini ke Kabupaten Anambas dikarenakan ketidakjelasan Pemerintah Daerah dalam menyediakan lahan.

Pada kesempatan yang sama Bupati Natuna Drs.H. Abdul Hamid Rizal M.Si, menyampaikan beberapa tanggapan dari berbagai partai Fraksi PNR, soal transparansi akuntabel APBD untuk diketahui bersama, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna dalam penyusunan APBD sudah mengutamakan aplikasi dan dijadikan contoh baik untuk Provinsi dan Kabupaten lainnya. Hal ini merupakan bukti bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna telah melakukan transparansi kredibilitas dan akuntabilitas sesuai dengan amanat Undang-Undang.

Sekarang ini, sambung Bupati, di Kabupaten Natuna sudah ada masyarakat yang terpapar Covid-19. Padahal, Daerah tersebut awalnya adalah Zona Hijau, namun sekarang sudah menjadi Zona Merah. Untuk itu Bupati mengajak kita semua agar bersama-sama menginformasikan kepada seluruh masyarakat, supaya tetap mematuhi protokol kesehatan agar pandemi Covid-19 dapat dihentikan.

Selain itu, lanjut Hamid Rizal, bahwa juga sudah ada dua (2) orang warga Natuna yang meninggal akibat terpapar Covid-19. Untuk itu, beliau meminta agar ada standarisasi dalam melakukan proses pemakaman Covid-19, dengan menggunakan bahan triplek. Hal ini dikarenakan tidak adanya bahan yang pas untuk pemakaman Covid-19 di Kabupaten Natuna, sehingga harus dipesan terlebih dahulu dari luar daerah.

Selanjutnya mengenai masalah BWSS yang ada di Kota Batam, yang berencana mengalihkan pembangunan Embung Sebayar, sampai saat ini Pemerintah Daerah belum mendapat laporan dari pihak BWSS terkait pengalihan pembangunan tersebut, dan saat ini sedang dilakukan tahapan pada proses kajian lokasi limbah yang akan dibangun Embung. (Pro_Kopim/Sono)

BUPATI NATUNA LANTIK BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SE-NATUNA



Bupati Natuna, Drs. H. Abdul Hamid Rizal, M.Si., melantik dan mengambil sumpah jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode 2020-2026. Bertempat di Aula Gedung Serbaguna Sri Serindit, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Selasa (01/12) pagi.

Hadir pada acara tersebut, Ketua DPRD Natuna Daeng Amhar beserta anggota, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat se-Kabupaten serta para tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya Hamid Rizal menyampaikan, bahwa Pelantikan Anggota BPD kali ini mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Hamid Rizal menyebutkan, jabatan BPD merupakan jabatan yang cukup strategis. Karena kedudukan BPD merupakan penyeimbang Kepala Desa, dengan fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, guna memastikan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan keinginan masyarakat.

Untuk itu, Bupati meminta agar seluruh anggota BPD yang baru saja dilantik, supaya peka terhadap kondisi di lingkungan Desa, dengan kewenangan yang dimiliki, bagi mendukung lahirnya Peraturan-Peraturan Desa yang sangat dibutuhkan masyarakat, terutama untuk pengembangan berbagai sektor, potensi, pelayanan serta peluang keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan Desa kedepan.

Namun demikian, pesan Hamid Rizal, masa New Normal harus menjadi acuan kita semua, dalam rangka memulihkan kondisi keterpurukan ekonomi, kendala pembangunan dan pelayanan, yakni dengan tetap menerapkan secara tegas protokol kesehatan dalam setiap aktifitas.

Lebih lanjut Hamid Rizal menyampaikan, bahwa salah satu yang menarik pada acara pelantikan tersebut, adalah adanya peran serta kaum perempuan yang semakin besar di Desa. Hal ini terlihat dari jumlah anggota BPD dari kaum perempuan yang mencapai 67 orang, atau sekitar 30,5 persen dari 220 anggota BPD pada hasil pemilihan di 44 Desa se-Kabupaten Natuna beberapa waktu lalu. Dengan adanya perwakilan perempuan ini, Bupati mengharapkan agar permasalahan gizi buruk pada balita, anak dan kesehatan pada ibu hamil, dapat teratasi dan menjadi perhatian khusus.

Hal ini bertujuan bagi menekan angka stunting di Kabupaten Natuna, yang menjadi salah satu fokus pencapaian pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah perbatasan. Untuk itu beliau meminta kepada Pemerintah Desa agar dapat membuat program prioritas, guna menuntaskan permasalahan tersebut diatas, yang dituangkan kedalam kegiatan pada setiap pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Terakhir Bupati berharap kepada anggota BPD yang baru, agar dapat bekerja dengan baik dan menjaga harmonisasi dengan Kepala Desa, bagi terwujudnya Desa di Natuna yang maju dan mandiri, serta masyarakat dapat merasakan dan menikmati hasil pembangunan ditingkat Desa. (Pro_Kopim/Sri, Diana).

PEMKAB NATUNA USULKAN SEJUMLAH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KE PEMERINTAH PUSAT



Bupati Natuna, melalui Asisten II bidang Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Tasrif, didampingi beberapa pimpinan OPD terkait mengikuti Vidcon acara Rapat Pembahasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Transportasi (Major Project dan PSN) RPJMN 2020-2024 di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), dengan Kemenko Maritim dan Investasi, yang dilaksanakan di Gedung Daerah Kabupaten Natuna, Jalan Batu Sisir, Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, Rabu (2/12) pagi.

Hadir pada kesempatan tersebut Pejabat Tinggi di beberapa Kementerian seperti Kemenko Maritim dan Investasi, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Bappenas, Perwakilan dari Pemerintah Provinsi Kepri dan beberapa perwakilan Bupati/Walikota se-Provinsi Kepri.

Dalam sambutannya Plt. Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Maritim dan Investasi, Ayodhia G. L. Kalake menyampaikan, rapat koordinasi ini bertujuan untuk membahas masalah yang ada di Pemerintah Provinsi Kepri.

Adapun agenda rapat yang dibahas diantaranya mengenai rencana pembangunan jembatan Batam-Bintan, Update progress pembangunan jalan dan jembatan trans Pulau Natuna, rencana pengembangan pelabuhan Batam dan rencana pembangunan Bandara di Kabupaten Natuna.

Pada kesempatan yang sama Asisten II bidang Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Tasrif menyampaikan, bahwa usulan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna yaitu rencana pembangunan Bandar Udara (Bandara) di Kelarik Kecamatan Bunguran Utara, pembangunan Bandara Perintis di Kecamatan Serasan, Kecamatan Subi dan Kecamatan Pulau Laut serta Bandara khusus waterbase di Pulau Senua, Kecamatan Bunguran Timur.

Adapun urgensi pembangunan Bandara baru adalah untuk mendukung perkembangan ekonomi daerah di perbatasan yang menjadi beranda terdepan NKRI, serta bagi mendukung industri perikanan dan pariwisata Kabupaten Natuna kedepan.

Untuk pembangunan Bandara khusus waterbase di Pulau Senua sendiri, lanjut Tasrif, sudah dilakukan kajian oleh Kementerian Perhubungan melalui Badan Penelitian dan Pengembangan, dan tinggal menunggu keputusan dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI).

Ditambahkan Tasrif, adapun usulan lain program strategis Kabupaten Natuna dibidang bina marga, diantaranya mengenai lanjutan pembangunan ruas jalan Teluk Buton – Kelarik, lanjutan peningkatan jalan lapis hotmix ruas jalan trans Batubi-Kelarik, rekonstruksi / peningkatan jalan lapis hotmix ruas jalan SP. Bukit Leman – Trans Batubi, pembangunan jalan Pantai Sisi Kecamatan Serasan, lanjutan pembangunan jalan lingkaran Serasan (PLBN), lanjutan jalan lingkaran Kecamatan Pulau Laut, pembangunan jembatan ruas jalan Teluk Buton – Kelarik, penggantian jembatan sungai Semala ruas jalan Trans Batubi dan pembangunan jembatan Seminte – Sedanau.

Tasrif mewakili Pemerintah Daerah dan Masyarakat di Kabupaten Natuna berharap, seluruh usulan yang disampaikan dapat terealisasi bagi menunjang kemajuan dan percepatan pembangunan serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir

PEMKAB NATUNA GELAR RAKOR BERSAMA BPJS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN NATUNA



Bertempat di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Natuna, Jalan Batu Sisir, Bukit Arai, Kecamatan Bunguran Timur, Bupati Natuna melalui Asisten II bidang Ekonomi dan Pembangunan, Tasrif, didampingi oleh sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kabupaten Natuna, pada Kamis (03/12) pagi.

Hadir dalam acara tersebut, Kepala Kantor Cabang Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Natuna, Sunardi, bersama sejumlah pegawainya.

Dalam sambutannya Tasrif menyampaikan, rakor ini digelar sebagai upaya bagi memberikan perlindungan jaminan sosial kepada seluruh tenaga kerja di Kabupaten Natuna, sekaligus dalam rangka menjalankan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS).

Dijelaskan Tasrif, program Jaminan kecelakaan kerja merupakan perlindungan dari resiko kecelakaan kerja, yang dapat dialami oleh pekerja saat bekerja. Manfaat yang diberikan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan, berupa uang tunai dan atau pelayanan kesehatan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja.

Hal ini berlaku dari mulai saat perjalanan dari rumah menuju tempat kerja, sampai kembali kerumahnya atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Kantor Cabang Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Natuna, Sunardi, bahwa rakor ini bertujuan untuk mengkolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, dalam rangka melindungi seluruh pekerja yang ada di Kabupaten Natuna.

Selain itu, lanjut Sunardi, pihaknya juga ingin mengetahui sejauh mana perkembangan program BPJS Ketenagakerjaan yang ada di Kabupaten Natuna selama tahun 2020. Baik mulai dari segi pelayanan, antusiasme peserta hingga masalah lain yang mungkin bisa menjadi bahan evaluasi mereka kedepannya.

Untuk itu Sunardi berharap, agar kiranya Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna dapat terus mendukung perlindungan bagi pegawai non ASN atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Tenaga Kontrak atau Harian Lepas (Harlep), kedalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Hal ini bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, dengan mengeluarkan Surat Edaran (SE) Bupati, agar dapat mewajibkan setiap pekerja konstruksi yang menggunakan dana APBD Natuna, untuk dapat dimasukkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Dijelaskan Sunardi, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, dapat juga mengajukan usulan perlindungan jaminan sosial bagi para petani dan nelayan, melalui dana APBD Natuna.

BPJS Ketenagakerjaan juga telah melakukan sosialisasi kepada seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, serta membantu mencari informasi terkait penyaluran baru bagi PTT yang belum menerima bantuan dampak dari pandemi Covid-19.

Selanjutnya Asisten II bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Natuna, didampingi Kepala Kantor Cabang Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Natuna, menyerahkan Santunan Jaminan Kematian kepada Ahli Waris atas nama Almarhum Suhardi dan Suhaimi serta Almarhumah Rosa Nadia Riska. (Pro_Kopim/Diana & Sri)

PENCANANGAN GERAKAN INDONESIA MEMBACA KABUPATEN NATUNA



Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Hikmatul Arif menghadiri acara Pencanangan Gerakan Indonesia Membaca Kabupaten Natuna yang dilaksanakan di Desa Pulau Tiga Kecamatan Pulau Tiga Barat, senin (7/12) pagi.

Hadir pada kesempatan tersebut beberapa pimpinan OPD Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, Camat beserta USPIKA Kecamatan Pulau Tiga Barat, Kepala Desa dan BPD Pulau Tiga, serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Hikmatul Arif menyampaikan saat ini minat membaca generasi muda dan masyarakat masih sangat rendah, hal ini salah satu penyebabnya adalah kurangnya akses.

Menurut UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001% artinya dari 1000 orang hanya 1 yang rajin membaca.

Dengan Gerakan Indonesia Membaca ini yang dipusatkan di Desa Pulau Tiga Kecamatan Pulau Tiga Barat diharapkan dapat mendukung serta menumbuhkan minat budaya membaca para generasi muda dan masyarakat sebagai jembatan dalam pengentasan kebodohan dan menjadikan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dapat diwujudkan.

Karena dengan kebiasaan membaca merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan, menambah wawasan serta pembentukan karakter dalam memperkaya informasi serta dapat menambah kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional dan kecerdasan sosial.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna, Suherman menyampaikan tujuan dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan komitmen Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah serta kesadaran masyarakat untuk meningkatkan literasi secara berkesinambungan.

Melalui Gerakan Indonesia Membaca ini diharapkan dapat mendorong peningkatan budaya baca masyarakat sehingga tercipta masyarakat pembelajar.

Camat Pulau Tiga Pulau Barat, Idris juga menyampaikan ini merupakan program dari Menteri Pendidikan Republik Indonesia yang harus kita laksanakan.

Kegiatan ini merupakan suatu kebanggaan bagi Kecamatan Pulau Tiga Barat khususnya Desa Pulau Tiga karena telah ditunjuk sebagai salah satu desa literasi seluruh Indonesia.

Hal ini akan menumbuhkan minat membaca bagi meningkatkan pengetahuan serta informasi selain menggunakan teknologi yang sudah modern.

Pada kesempatan tersebut juga diserahkan bantuan buku untuk Taman Bacaan Masyarakat Desa Pulau Tiga dari CSR Bank Riau Kepri.

Kemudian acara dilanjutkan dengan peresmian Taman Baca Masyarakat " Madah Seloka" Desa Pulau Tiga Kecamatan Pulau Tiga Barat yang ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pembukaan papan selubung serta doa tepung tawar

ASISTEN 1 SETDA NATUNA PIMPIN RAPAT RENCANA KERJASAMA PT. GARUDA INDONESIA



Sarana transportasi berperan penting dalam menunjang kemajuan di suatu daerah. Sebuah daerah akan cepat berkembang, jika sarana transportasi yang tersedia cukup memadai, terlebih lagi moda transportasi udara, yang memiliki ekstra seperti waktu tempuh relative singkat dari satu daerah ke daerah lain.

Hal tersebut juga dirasa oleh masyarakat Kabupaten Natuna yang berada di wilayah perbatasan, keberadaan moda transportasi udara yang lebih memadai akan berdampak pada perputaran ekonomi masyarakat yang lebih cepat, pelaksanaan pembangunan segala bidang juga akan dapat direalisasikan secara lebih maksimal.

Hal tersebut disampaikan Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Budi Darma dalam sambutan pembukanya dalam rapat koordinasi yang dihadiri beberapa pejabat diantaranya Kepala Bagian Antar Lembaga, Plt. Kepala Dinas Perhubungan serta beberapa pejabat dinas terkait.

Kegiatan yang digelar Selasa (08/12) siang, bertempat di Ruang Kerja Kepala Bagian Kerjasama Setda Kabupaten Natuna tersebut membahas terkait kajian rencana pembukaan rute penerbangan baru dan jadwal penerbangan dari Tanjungpinang menuju Kabupaten Natuna.

Budi Darma menjelaskan, bahwa rencananya Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna akan menjalin kerjasama dengan PT Garuda Indonesia, yang merupakan salah satu maskapai penerbangan di Indonesia.

Dijelaskan bahwa pihak maskapai Garuda Indonesia telah menyampaikan keinginannya untuk membuka rute penerbangan dari Jakarta-Tanjungpinang-Natuna. Informasi tersebut juga sudah disampaikan kepada Kepala Bandara kelas III Ranai, Kabupaten Natuna.

Sebelumnya Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna juga sudah beberapa kali menyurati sejumlah maskapai penerbangan, untuk membuka rute penerbangan dari dan ke Natuna, termasuk kepada maskapai Citilink, namun hingga saat ini belum ada kelanjutannya.

Budi Darma berharap kerjasama ini nantinya dapat membawa dampak positif bagi pembangunan Kabupaten Natuna ke arah yang lebih baik. Salah satunya bagi menunjang pembangunan sektor pariwisata, dan membuka peluang bagi pelaku jasa ekspedisi atau pengiriman barang dari Tanjungpinang ke Natuna maupun sebaliknya, yang selama ini sering mengalami kendala.

Sementara itu Kabag Kerjasama Setda Natuna, Ronnie Indra menyampaikan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Manager Operasional PT Garuda Indonesia cabang Tanjungpinang untuk membuka peluang penambahan rute penerbangan dari Tanjungpinang ke Natuna.

Dalam kesempatan yang sama, Plt. Kepala Dinas Perhubungan Natuna, Khaidir, mengaku akan mempersiapkan segala persyaratan dan mengumpulkan data-data pendukung bagi keperluan kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna dengan PT Garuda Indonesia. (Pro_Kopim/Diana, Sri)

BUPATI NATUNA HADIRI PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS



Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugas serta pola kehidupan sehari-hari telah diatur oleh negara melalui ketentuan hak dan kewajiban, kode etik yang harus dipatuhi. Hal ini dimaksud agar dalam menjalankan tugasnya masyarakat dapat memperoleh manfaat melalui bentuk pelayanan serta pelaksanaan program kerja pembangunan.

Untuk itu, integritas yang tinggi harus dimiliki oleh seluruh ASN, sehingga dalam melaksanakan tugasnya dapat diselenggarakan secara professional dan tepat sasaran sebagai bentuk keterwakilan negara ditengah masyarakat.

Hal ini di sampaikan Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal pada acara Penganangan Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah Bebas dari Korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional, Ranai, Kamis. (10/12) pagi.

Hadir pada acara tersebut diantaranya Wakil ketua DPRD Kabupaten Natuna, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para pejabat Notaris, dan beberapa tokoh masyarakat.

Hamid menjelaskan bahwa kepemilikan sertifikat tanah bagi masyarakat sangat penting, sebagai bentuk jaminan negara terhadap hak milik masyarakat yang sah, sekaligus sebagai dasar pemungutan pajak bagi distribusi daerah yang pada gilirannya menjadi modal pelaksanaan pembangunan daerah.

Oleh karenanya, Pemerintah Daerah sangat mendukung pelaksanaan program kerja BPN Natuna sebagai langkah tepat bagi percepatan reformasi birokrasi, untuk peningkatan integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah bersih dan melayani.

Pada kesempatan yang sama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna, Abdillah Husain menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan zona integritas ditentukan oleh task kertas dan integritas masing-masing individu, serta komitmen bersama dan kontribusi masyarakat.

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Natuna telah komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, melalui birokrasi khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kuantitas kepercayaan publik yang menjadi perhatian bersama.

Pembangunan zona integritas adalah langkah awal dan bagian dari mensukseskan birokrasi dengan melakukan penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif, efisien serta pelayanan prima. (Pro_kopim/Soen)

KEMBANGKAN PARIWISATA NATUNA, UNRI TEKEN MOU BERSAMA NDR



(wartaKominfo) – Sebagai Upaya mengembangkan sektor pariwisata Kabupaten Natuna, Universitas Riau (UNRI) bersama Natuna Dive Resort (NDR) mengadakan diskusi sekaligus penandatanganan MoU yang dihadiri oleh beberapa instansi Pemerintahan Kabupaten Natuna seperti Disparbud Natuna, Disdik Natuna, dan Diskominfo Natuna.

“Kerjasama ini terkait pengembangan sektor pariwisata, ini awal saja, kemungkinan nanti kita akan ke Natuna lagi untuk membicarakan lebih lanjut,” kata Konsultan Bidang Usaha (BPU) sekaligus Guru Besar Manajemen Universitas Riau, Prof. DR. Hj. Marnis SE, MS usai menandatangani MoU kerjasama tersebut di NDR, Sepempang, Ranai, Natuna, Jum’at (11/12/2020)

Ia juga mengatakan bahwa Natuna memiliki potensi pariwisata yang sangat menjanjikan, karena itu ia sangat tertarik untuk bekerja sama dengan NDR.

Selain itu juga, ia mengatakan Natuna memiliki alam berbeda dengan daerah lain di Indonesia.

“Jika kerjasama ini berjalan dengan baik, maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat”, Kata Marnis.

Ia juga mengatakan konsep NDR sangat bagus, dengan membangun resort di tengah bebatuan membuat tempat tersebut tampak berbeda.

“Tidak kita temukan konsep seperti ini dimana pun, dengan adanya NDR di Natuna dapat menjadi motor penggerak ekonomi bagi Natuna, asal ada kerjasama semua pihak, ini semua akan bermuara pada tumbuhnya ekonomi masyarakat”, kata Marnis.

Selain itu, ia juga mengatakan bukti nyata dampak dari pengembangan sektor pariwisata yang dimulai oleh NDR tersebut telah bisa dilihat nyata saat ini.

“Yang paling sederhana saat ini kita bisa lihat, warga sekitar telah menerima manfaat secara langsung, contoh saja, untuk memenuhi kebutuhan makanan para tamu di sini (NDR) saja melibatkan ibu RT di samping, belum lagi tenaga kerja yang lain”, kata Marnis.

Karena itu ia berharap ada dukungan dari berbagai pihak untuk sama-sama mengembangkan pariwisata yang menjadikan NDR sebagai motor penggerak sektor pariwisata di Natuna.

“Kita tidak bisa membangun sektor pariwisata sendiri-sendiri, dinas pariwisata ataupun hanya NDR saja, semua harus saling bersinergi satu sama lain, saya yakin pariwisata Natuna akan berkembang jika kita mempunyai tim yang solid, saya yakin itu”, ujar Marnis.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna mengatakan bahwa Natuna sejak Tahun 2018 telah didorong untuk dikembangkan sektor pariwisata oleh pemerintah pusat dengan ditetapkannya Natuna sebagai Geopark Nasional.

Menurutnya, maka sangat baik adanya kerjasama sama antara UNRI bersama NDR untuk pengembangan sektor pariwisata.

“Telah ada kesepakatan NDR dengan UNRI, kedepan, bisa kita tindak lanjuti, mudah-mudahan bisa juga kedepannya ada kerjasama bersama pemda Natuna”, kata Hardinasyah.

Saat ini, kata Hardinasyah, dalam pengembangan pariwisata Natuna masih terkendala aksesibilitas.

“Namun kita sambut baik adanya wacana NDR akan membuka penerbangan sendiri dengan menggunakan pesawat carter,” kata Hardinasyah.

Sementara, Direktur utama NDR, Salsabila Aisha mengatakan bahwa konsultan bidang usaha (BPU) sekaligus Guru Besar Manajemen Universitas Riau, Prof. DR. Hj. Marnis dihadirkan sebagai wujud keseriusan NDR untuk mengembangkan sektor pariwisata di Natuna.

“Kami, NDR tidak lebih sebagai pintu atau wadah bagi kita semua dalam pengembangan pariwisata Natuna secara bersama-sama, BPU dibawah naungan UNRI dalam hal ini Ibu Marnis selaku konsultannya, kita yakin akan memberikan kontribusi besar untuk pengembangan pariwisata di Natuna kedepan,” kata Salsabila.

Selain penandatanganan MoU kerjasama antara NDR bersama UNRI, juga dilakukan diskusi santai terkait pengembangan pariwisata Natuna yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Hardinansyah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna, Raja Darmika, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna, Suherman, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Natuna, Kartubi, dan selaku narasumber Guru Besar Manajemen UNRI Prof. DR. Hj. Marnis SE, MS dan beberapa tamu undangan lainnya

TIGA TAHUN KOPI PAGI, INSPIRASI TIADA HENTI



(wartaKominfo) – Jum’at 11 Desember 2020, merupakan edisi special dari Program Kancah Opini Pagi Hari (Kopi Pagi). Sebuah inovasi yang dikemas dalam bentuk dialog interaktif setiap jum’at pagi oleh Diskominfo Natuna kerjasama dengan RRI Ranai tersebut telah mencapai chapter terakhir di tahun 2020.

Berjalan kurang lebih tiga tahun, Kopi Pagi diharapkan dapat menjadi wadah untuk menampung opini publik sekaligus wadah yang dapat memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan masyarakat Natuna terkait isu yang sedang hangat. Sesuai konsepnya yaitu mengupas tuntas permasalahan yang sedang viral atau hangat di media sosial.

“Harapan kami dengan adanya Kopi Pagi ini, obrolan yang diwarung-warung kopi itu yang maksudnya masih tidak jelas kebenarannya bisa dapat jawaban yang jelas di kopi pagi, karena kopi pagi menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten dan kredibel sesuai dengan tema yang dibahas” jelas Kadis Kominfo, Raja Darmika.

Kopi pagi juga telah mendapatkan penghargaan berupa inovasi daerah pada lomba inovasi tahun 2020 yang digelar oleh BP3D Kabupaten Natuna. Semakin berkembang, selain dapat didengar melalui siaran RRI, kopi pagi juga disiarkan secara langsung di medsos yaitu facebook diskominfo Natuna.

Selanjutnya, Kapsta RRI Ranai, Apral Miswirawan menilai bahwa kopi pagi banyak sekali nilai positifnya. Menurutnya, ada beberapa moment penting yang berhasil diangkat oleh kopi pagi, seperti Natuna mulai kedatangan orang dari Wuhan.

“Ketika kita kedatangan orang Wuhan saat pertama kali pandemi covid didunia, kita bisa lihat bagaimana paniknya masyarakat disini. Kemudian kopi pagi berhasil mengangkat tema tema tersebut dan berhasil menggema hingga ke pemerintah pusat” tutur Apral.

“Dan banyak hal yang nampak tak berarti tapi tak terbayangkan dampaknya jika hal hal tersebut tidak kita angkat. Lantas pada akhirnya Pemda atau DPR tergerak untuk membuat aturan atau kebijakan” sambung nya.

Apral melanjutkan, bahwa sebagai media RRI memberika hiburan, edukasi dan juga memberi ruang kepada masyarakat untuk ‘menyampaikan’.

Hadir pada kesempatan tersebut, Sayed Mukhtarhadi sebagai seseorang yang rering memonitor kopi pagi. Menurutnya kopi pagi merupakan obrolan yang menarik, sehingga ia jarang melewatkan acara tersebut. Baginya kopi pagi adalah media yang memberikan pencerahan kepada masyarakat terhadap isu yang sedang berkembang.

“Tema yang diangkat memang sedang dipermasalahkan di masyarakat sehingga menjadi jelas akurat dan terpercaya. Kopi pagi memberikan pencerahan, jangan sampai kita tidak tau kebenaran suatu berita.” kata sayed yang akrab disapa abib.

Sedangkan menurut Bung Dede dari kaum milenials Natuna, ada 3 hal yang menarik dari kopi pagi yaktu, pertama kopi pagi sebagai media klarifikasi, sebagai media apresiasi, dan juga inspirasi.

“Kalrifikasi jika ada berita yang tidak sehat, apresiasi dengan apa-apa yang telah dibuat oleh anak Natuna, dan inspirasi bagi pihak lainnya untuk membuat suatu obrolan yang hampir sama” jelas Bung Dede.

Untuk kopi pagi, diharapkan meskipun merupakan edisi di penghujung tahun, mudahan bukan menjadi penghujung bagi karir kopi pagi. Tiga Tahun Kopi Pagi, Inspirasi Tiada Henti (diskominfo/Fera)

VIDCON PENYERAHAN LPH BPK PERWAKILAN KEPRI TERKAIT SPBE KABUPATEN NATUNA



(wartaKominfo) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menggelar acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas kinerja efektivitas Pengelolaan Sitem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan tahun 2019 s.d. 2020 kepada Pemkab Natuna, Pemkab Bintan dan Instansi Terkait lainnya. Senin, (14/12).

Menurut Ketua Perwakilan BPK, Masmudi sehubungan dengan pandemi covid-19, dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19 maka penyerahan LHP tersebut dilakukan secara virtual atau online melalui video converence. Dalam kesempatan tersebut ia juga mengapresiasi kinerja dari Pemkab Natuna dan Pemkab Bintan.

“Kami atas nama pimpinan BPK yang berkesempatan menyampaikan LPH mengapresiasi dan berterimakasih kepada ketua DPRD dan Bupati Kabupaten Natuna atau yang mewakili, Ketua DPRD Bintan dan Bupati Bintan atau yang mewakili serta jajarannya atas kerjasamanya sehingga secara bersama-sama kita selalu berusaha dan berkomitmen dalam mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yg transparan dan akuntabel” tutur Masmudi.

Dalam kesempatan tersebut dijelaskan olehnya, bahwa pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan SPBE dalam pengelolaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dari tahun 2019 s.d. tahun 2020 semester I.

Dari hasil identifikasi pengembangan secara nasional, ditemukan beberapa permasalahan antara lain :

-belum adanya tata kelola SPBE terpadu secara nasional -
SPBE belum diterapkan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik secara menyeluruh dan optimal.

-Jangkauan infrastruktur ke semua wilayah yang masih belum maksimal, dan

-Adanya keterbatasan jumlah ASN yang kompeten dengan TIK. Hadir pada vidcon tersebut, Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprpti mewakili Bupati Natuna. Ia menyampaikan bahwa Pemkab Natuna telah berupaya mengoptimalkan SPBE di lingkungan kerja Pemkab Natuna.

“Maka dari itu pemerintah daerah kabupaten Natuna sudah berusaha melakukan beberapa langkah strategis untuk merealisasikan SPBE dengan membangun aplikasi yang terintegrasi dengan semua layanan akan tetapi sistem elektronik yang kami miliki masih belum optimal karena banyaknya perubahan terhadap sistem tata kelola pemerintah sehingga harus disesuaikan kembali” ujar nya.

Sehubungan dengan evaluasi efektivitas kinerja SPBE, Ngesti juga mengatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna juga menerima kritik, saran, serta rekomendasi dari berbagai pihak agar penyelenggaraan SPBE di Natuna menjadi lebih baik

NATUNA GELAR DEKLARASI KOMITMEN BERSAMA DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK



Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti menghadiri Peringatan Hari Ibu (PHI) Ke- 92 Tahun 2020, bertempat di Aula Gedung Sri- Serindit Ranai, Selasa (22/12) pagi. Kegiatan tersebut dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Natuna, FKPD, pimpinan OPD, Ketua Tim PKK, Ketua GOW, para ketua dan kader Organisasi Perempuan, Ketua Komisioner RPPAD, dan tokoh perempuan Se- Kabupaten Natuna.

Ngesti ketika membacakan sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Agama Republik Indonesia, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, menyampaikan bahwa Peringatan Hari Ibu yang Ke-92 saat ini sangat berbeda dengan Peringatan Pada Tahun-tahun sebelumnya, mengingat Pandemic Covid-19 yang berdampak baik kehidupan ekonomi maupun social.

Selanjutnya, saat ini Indonesia sebagaimana Bangsa-bangsa lain di dunia harus berjuang untuk bertahan hidup serta menanggulangi penyebaran Covid 19. Dengan kondisi tersebut, sangat disayangkan apabila perempuan masih harus menghadapi berbagai ketimpangan, mulai dari mengakses, berpartisipasi, ikut menentukan arah serta menikmati manfaat pembangunan, terlebih lagi kondisi ini menempatkan perempuan dalam situasi yang lebih rentan.

Melalui tema yang diusung, yakni " Perempuan Berdaya Indonesia Maju", diharapkan menjadi momen penting untuk mendorong seluruh pemangku kepentingan dunia bagi memberikan perhatian dan pengakuan akan pentingnya eksistensi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan.

Melalui PHI yang Ke 92 ini juga, diharapkan perempuan-perempuan Indonesia lebih sadar betapa berharga dirinya, terutama karena tidak pernah berhenti merawat perjuangan para perempuan Indonesia dimasa lalu.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna, Rika Azmi melaporkan bahwa PHI yang dilaksanakan setiap tahunnya merupakan upaya bangsa Indonesia untuk mengenang dan menghargai perjuangan perempuan Indonesia dalam merebut dan mengisi kemerdekaan.

Instruksi presiden Jokowi di dalam RPJMN Tahun 2019-2024 menetapkan 5 isu perkembangan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu Peningkatan perempuan dalam kewirausahaan, Peningkatan peran ibu / keluarga dalam pendidikan dan pengasuhan anak, Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, Penurunan kerja anak, Pencegahan perkawinan anak.

Menurut Rika, PHI tahun ini terasa istimewa, karena hingga saat ini memperlihatkan sisi lain dari perjuangan perempuan untuk menekan penyebaran Covid 19, mulai dari membimbing keluarga saat berada dirumah, menjadi tulang punggung bagi keluarga hingga menjadi garda terdepan penyembuhan Covid.

Selain itu juga dalam peranannya baik sebagai dokter, prawat, perempuan sebagai ibu juga harus lebih memastikan anak-anak dan anggota keluarga tetap berada dirumah dan membuat suasana nyaman dan aman.

Rika juga menambahkan bahwa perjuangan perempuan belumlah selesai, pencapaian indeks pemberdayaan gender masih dirasa lambat, khususnya di Kabupaten Natuna mengalami penurunan sejak tahun 2019, antara lain disebabkan rendahnya peran politik perempuan dengan tidak adanya perwakilan perempuan di Legislatif.

Pada kesempatan ini juga, Rika atas nama Pemerintah Kabupaten Natuna juga mengucapkan selamat kepada Ibu Hj. Nurhayati Hamid Rizal yang mendapatkan penghargaan sebagai perempuan Inisiator Pembangunan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang diserahkan pada tanggal 19 Desember 2020 lalu.

Dalam kesempatan tersebut juga digelar Pengucapan dan Penandatanganan Deklarasi Komitmen Bersama Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Kabupaten Natuna, diserahkan kepada Kepala Desa Samedang dan Kepala Desa air Lengit, berdasarkan Keputusan Kepala DPMD Kabupaten Natuna, sebagai tindak lanjut dari Komitmen bersama antara Kementerian Desa PDT, dan Kementerian PPA. (Pro-Kopim/Diana, Sri, Esal)

EDISI DESEMBER 2020

WARTA KOMINFO



DISKOMINFO.NATUNAKAB.GO.ID
NATUNAKAB.GO.ID